

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Dengan adanya reformasi atau pembaharuan di dalam sistem pertanggungjawaban keuangan daerah, sistem lama yang selama ini digunakan oleh Pemda yaitu Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA) yang diterapkan sejak tahun 1981 sudah tidak dapat lagi mendukung kebutuhan Pemda untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Selain itu, keinginan masyarakat juga didorong keinginan untuk menciptakan *good government governance* yang dapat mewujudkan tuntutan akan tingkat transparansi dan akuntabilitas publik yang baik.

Belum tertibnya pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi oleh masih terbatasnya sumber daya manusia yang menguasai pengelolaan keuangan daerah. Dengan kata lain, unsur kualitas sumber daya manusia berperan penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Sumber daya manusia merupakan kunci dari keberhasilan suatu instansi atau perusahaan karena sumber daya manusia pada suatu instansi memiliki nilai tinggi yang disebabkan oleh kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan.

Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Begitu juga pada entitas pemerintahan, untuk menghasilkan laporan keuangan

daerah yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang paham dan memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi pemerintahan keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan (Roviyantie, 2011).

Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka dibutuhkan kapasitas sumber daya manusia yang dapat melaksanakan sistem akuntansi, oleh karena itu sistem akuntansi sebagai suatu sistem informasi membutuhkan kemampuan manusia untuk menjalankan sistem yang ditetapkan.

Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, maka pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal pula. Sistem akuntansi yang lemah dapat menyebabkan pengendalian internal lemah dan pada akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan dalam mengambil sebuah keputusan.

Saat ini sistem akuntansi yang dimiliki oleh pemerintah daerah rata-rata masih lemah. Sistem akuntansi yang handal dan didasarkan atas standar akuntansi pemerintahan akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan secara lebih transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel.

Diketahui bahwa ada banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai. Adapun kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat sebagaimana disebutkan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi

Pemerintahan terdiri dari: (1) relevan; (2) andal; (3) dapat dibandingkan; dan (4) dapat dipahami.

Saat ini perkembangan kualitas laporan keuangan serta akuntabilitas atas LKPD belum mencapai harapan. Hal ini terlihat dari beberapa opini atas LKPD yang diberikan oleh BPK RI yang masih mendapatkan opini *disclaimer* atau tidak memberikan pendapat. Fenomena kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah di Indonesia dari tahun 2008 - 2012, ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Opini LKPD Tahun 2008 – 2012**

LKPD (Tahun)	OPINI								Jumlah
	WTP	Persentase	WDP	Persentase	TW	Persentase	TMP	Persentase	
2008	13	3%	323	67%	31	6%	118	24%	485
2009	15	3%	330	65%	48	10%	111	22%	504
2010	34	7%	341	65%	26	5%	121	23%	522
2011	67	13%	349	67%	8	1%	100	19%	524
2012*	113	27%	267	64%	4	1%	31	8%	415

Sumber: IHPS 1 Tahun 2013, BPK RI

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas mengenai perkembangan opini LKPD tahun 2008 - 2012, diketahui bahwa opini LKPD pada tahun 2008 yang diberikan kepada 485 LKPD, tahun 2009 kepada 504 LKPD, tahun 2010 kepada 522 LKPD, dan tahun 2011 kepada 524 LKPD. Sampai dengan semester 1 tahun 2013, opini baru diberikan kepada 415 LKPD tahun 2012, karena belum seluruh pemerintah daerah dapat menyelesaikan penyusunan laporan keuangan dan/atau terlambat menyerahkan laporan keuangan kepada BPK.

Adanya peningkatan persentase opini WTP, dan penurunan persentase opini WDP serta TMP secara umum, menggambarkan bahwa adanya perbaikan yang telah dicapai oleh beberapa entitas pemerintahan daerah tersebut dalam menyajikan

suatu laporan keuangan yang wajar sesuai dengan prinsip yang berlaku. Selanjutnya, penyajian suatu laporan keuangan yang wajar merupakan gambaran dan hasil dari pengelolaan keuangan yang lebih baik. Laporan keuangan adalah tanggung jawab entitas. Opini yang diberikan atas suatu laporan keuangan merupakan cermin bagi kualitas pengelolaan dan penyajian atas suatu laporan keuangan.

Namun masih terdapat 31 LKPD yang memperoleh opini TMP yang pada umumnya laporan keuangan tidak dapat diyakini kewajarannya dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang disebabkan oleh pembatasan lingkup pemeriksaan, kelemahan pengelolaan yang material pada akun aset tetap, kas, piutang, persediaan, investasi permanen dan non permanen, aset lainnya, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

BPK menemukan 1.586 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, yang terdiri atas:

- Sebanyak 895 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat,
- Sebanyak 498 kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan,
- Sebanyak 16 kasus entitas terlambat menyampaikan laporan,
- Sebanyak 163 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, dan
- Sebanyak 14 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai.

(<http://www.bpk.go.id/ihps/>)

Sebuah fenomena yang terjadi di Kota Bandung pada tahun 2010 lalu, diketahui bahwa BPK mengeluarkan opini *disclaimer* atau menolak memberikan pendapat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung tahun 2009. Dalam laporan yang dikeluarkan oleh BPK tertulis bahwa Pemkot Bandung menyajikan laporan penyertaan modal yang tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan. (<http://m.news.viva.co.id/>)

BPK mengalami kesulitan untuk melakukan prosedur alternatif mengingat Satuan Perangkat Kerja daerah tidak melakukan pencatatan atas mutasi persediaanya. Jikapun ada pencatatan, hanya dilakukan oleh sebagian SKPD dan antar catatan atas persediaan tersebut tidak saling mendukung sehingga tidak dapat diverifikasi. (<http://nasional.tempo.co/>)

Selain itu, penyajian aset tetap tidak didukung dengan rincian daftar aset maupun dokumen berupa daftar inventarisasi dan penilaian aset tersebut. Jikapun daftar inventarisasi tersebut dimiliki, data tersebut sudah tidak mutakhir dan tidak valid yang disebabkan mutasi barang antar SKPD tidak diikuti dengan mutasi pencatatannya. (<http://www.pikiran-rakyat.com/>)

Kepala Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat menilai, minimnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih menjadi faktor utama yang menjadi titik lemah penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (Pemda) di Jawa Barat. Menurutnya, saat ini hampir di seluruh Pemda, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota di Jawa Barat masih sangat minim SDM yang memiliki latar belakang akuntansi atau auditor. Karena itulah, laporan keuangan masih banyak kekurangannya. (<http://www.pikiran-rakyat.com/>)

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Devi Roviyantje (2011) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Survei pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tasikmalaya)”. Peneliti berasal dari Universitas Siliwangi Tasikmalaya.

Penulis menggunakan penelitian terdahulu dimaksudkan untuk dijadikan bahan pertimbangan adanya beberapa persamaan di dalam penelitian. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yang diteliti; variabel independen (bebas) yaitu kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan untuk variabel dependen (terikat) adalah kualitas laporan keuangan daerah. Peneliti melakukan penelitian pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tasikmalaya melalui perangkat kuesioner tertutup. Populasi dalam penelitian ini adalah SDM/pegawai sub-bagian keuangan/akuntansi di 27 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode pengambilan sampel *nonprobability sampling* dengan pendekatan *sampling purposive*. Adapun yang menjadi pertimbangan peneliti dalam penentuan sampel penelitian yaitu; 1) Dinas merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah, 2) Dinas merupakan lembaga pelayanan masyarakat yang senantiasa dapat melayani kebutuhan masyarakat, salah satunya melayani penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem

akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Perbedaan yang dilakukan terhadap penelitian terdahulu (Devi Roviyantie, 2011) yaitu pada tempat penelitian dimana penulis melakukan penelitian pada DPKAD dan Inspektorat Kota Bandung dengan perangkat kuesioner tertutup. Peneliti juga menambahkan dimensi penelitian untuk setiap variabel yang yang diteliti. Penelitian sebelumnya menggunakan skala pengukuran interval sedangkan penulis menggunakan skala pengukuran ordinal.

Berdasarkan teori dan uraian di atas dan didukung dengan beberapa fakta yang ada, penulis ingin meneliti lebih jauh dan mendalam mengenai **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi empiris pada DPKAD dan Inspektorat Kota Bandung)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka penulis mengemukakan beberapa identifikasi masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kompetensi sumber daya manusia pada Pemerintah Kota Bandung.
2. Bagaimana penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Pemerintah Kota Bandung.

3. Bagaimana kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kota Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara simultan pada Pemerintah Kota Bandung.

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang akan digunakan dalam penelitian mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan peranan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah penelitian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan peranan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kompetensi sumber daya manusia pada Pemerintah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Pemerintah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang Pemerintah Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara simultan pada Pemerintah Kota Bandung.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu kegunaan secara praktis dan kegunaan secara teoritis yang akan dijelaskan sebagai berikut:

### 1.4.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh antara lain:

#### 1. Bagi Penulis

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang dan untuk meraih gelar sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai metode penelitian yang menyangkut masalah akuntansi sektor publik secara umum.
- c. Hasil penelitian ini juga akan melatih kemampuan teknis analitis yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan dalam melakukan pendekatan terhadap suatu masalah, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### 2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi khususnya bagi pihak-pihak lain yang meneliti dengan kajian yang sama yaitu kompetensi sumber daya manusia, peranan sistem akuntansi keuangan daerah, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### 3. Bagi Pemerintah

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai keadaan kompetensi sumber daya manusia, peranan sistem akuntansi keuangan daerah, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah khususnya pada Pemerintah Kota Bandung.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghimpun informasi sebagai bahan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah guna meningkatkan kinerja dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

### 4. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran awam mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia, peranan sistem akuntansi keuangan daerah, terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

#### **1.4.2 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dalam memperbanyak pengetahuan yang berhubungan dengan kompetensi sumber daya manusia, peranan sistem akuntansi keuangan daerah, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada satuan kerja perangkat daerah. Serta dapat mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya manusia, peranan sistem akuntansi keuangan daerah, terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kota Bandung.